

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini untuk membangun manusia menjadi manusia yang mandiri untuk kemudian manunggal dengan manusia lain atau masyarakat dimana ia berada, mandiri dalam arti ia memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang di perlukan untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan perwujudan diri individu, dan bagi kehidupan suatu bangsa. Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan sebagai pendorong kemajuan suatu bangsa, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pembiayaan, sistem, kurikulum, dan lain sebagainya merupakan peningkatan mutu pendidikan, sehingga Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 6 juga menegaskan bahwa: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan..¹

¹ P3M STAIN Tulungagung et.al, “*Ta’alum Jurnal Pendidikan Islam*”, (Tulungagung, volume 28, Nomor 1, 2005), hlm. 131

Sebagaimana tersebut dalam undang undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Maka dengan pendidikan itu perubahan akan nampak dalam proses perubahan pikiran manusia, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui karena pendidikan adalah suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia, agama, dan khususnya bangsa Indonesia agar tidak sampai tertinggal dengan bangsa lain, dan dalam mengelola pendidikan khususnya di suatu sekolah merupakan tugas kepala sekolah agar mutu pendidikan di sekolah berkualitas dengan merencanakan program, dimulai dari merencanakan kebutuhan SDM yang akan menjalankan tugas, merencanakan kebijakan berupa program kepala sekolah dan kurikulum yang akan dijalankan di sekolah. Dalam perencanaan ini kepala sekolah selalu melibatkan guru, PKS dan Komite Sekolah.

Peran kepala sekolah dalam mengorganisasikan program yaitu membuat struktur organisasi sekolah yang melibatkan orang tua melalui Komite Sekolah, melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh sekolah, pembagian tugas seperti adanya

² Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Undang Undang SISDIKNAS* (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal. 6

PKS dan TU sesuai sesuai kemampuan guru baik di tingkat kelas maupun keterampilan yang mereka miliki.³

Sekolah merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membina kepribadian anak, melalui pembelajaran sesuai kurikulum yang berisikan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memperbaiki nasib hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan sekolah yang berkembang akan memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga tidak dapat diabaikan eksistensinya sebagai wadah untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya diharapkan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3).⁴

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia pembangunan, pendidikan tidak hanya terfokus pada kebutuhan material tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral dan spiritual yang luhur. Dalam hal ini kualitas pendidikan

³ Yogi Irfan Rosyadi dan Parrdjono, *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan : Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP I Cilawu Garut*, (Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Rusyani Hikmatul Rosyad, VI. 3 No .1Periode April 2015), hal.125

⁴ Depdiknas undang undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jakarta 2003 .

dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan (political will) pemerintah, baik pusat maupun di daerah dan termasuk kebijakan kepala sekolah.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang menuntut pengelola pendidikan agar dapat membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan secara mandiri sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta mutu tenaga pendidikan sesuai dengan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud termasuk kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁵

Dalam dunia pendidikan di era globalisasi masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan di negara kita adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk ahli pendidikan, bahwa masalah mutu pendidikan sebuah proses pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan bangsa dalam berbagai bidang.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3

khususnya dalam mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih rendah.

Oleh karena itu, sekolah di tuntut dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terwujud kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan penyediaan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja guru dengan mengatur kegiatan kegiatan di sekolah yang di buat oleh kepala sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat berbagai faktor faktor yaitu. Menurut Fattah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: (1) kecukupan sumber sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar, (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif,dan (3) mutu pengeluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap ,keterampilan dan nilai-nilai.⁶

Dengan demikian, mutu pendidikan di sekolah akan berkembang dan memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga tidak dapat diabaikan eksistensinya sebagai wadah untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan terpenuhnyanya tenaga kependidikan, biaya sarana belajar, sehingga mendrong siswa belajar efektif dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai nilai.

Di samping itu juga, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

⁶ Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2015) Hlm, 313

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production foundation* atau input input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, yaitu terlalu memusatkan pada input proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.
2. Penyelenggraan pendidikan nasional yang sentralistik, telah mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang mempunyai jalur yang panjang dan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimnya partisipasi mereka terhadap pendidikan.⁷

Dalam kata lain masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di indonesia yaitu:

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientas pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang.

⁷ E ,Mulyasa , *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolahn* (Jakarta Bumi Aksara) 24

2. Kurikulum di sekolah yang selalu berubah ubah yaitu kurikulum 1994 berupa CBSA, menjadi KBK, lalu ditahun 2006 menjadi KTSP dan K13 (Berbasis karakter).
3. pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem.
4. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 2o tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD kedinasan, namun kenyataanya hanya beberapa dari yang menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negri, dan tidak sepenuhnya gratis yang masih ada beberapa pungutan beberapa biaya dari sekolah yang penagaturannya biasanya di lakukan oleh sekolah dan komite sekolah.
5. Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan kerjasama regional.⁸

Dengan masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di indonesia, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan profesional karena kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas seorang kepala sekolah. Keberhasilan

⁸ M Hasbullah *Kebijakan Pendidikan dalam Perpektif Teori, Aplikasi danKondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta Raja wali Pers, 2016) h. 49

sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah menuju kearah kemajuan, dalam era persaingan yang semakin bebas seperti saat ini. Pemimpin lembaga pendidikan dituntut untuk dapat memberikan kualitas pendidikan yang bermutu karena pendidikan yang kurang bermutu lama kelamaan akan ditinggal oleh masyarakat dan tersingkirkan dengan sendirinya.

Mutu pendidikan suatu instansi madrasah yang sangat di perlukan karena suatu pembentuk karakter penerus bangsa. Membentuk Intellegence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) , Emotional Spiritual Quotient (ESQ). kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan mampu mencetak lulusan sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa dan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan.⁹

Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang inputnya yaitu struktur organisasi sekolah peraturan perundang undangan , visi misi tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Oleh karena itu tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input.

⁹ Afifah Thaiyibah dan Syafaruddin *Jurnal Tadbir: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Man 3 Medan*, (Vol.2 No.2 Juli Desember 2016) h.82

Namun demikian, indikator mutu pendidikan menunjukkan peningkatan yang berarti bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor *input* agar menghasilkan *out put* yang setinggi-tingginya. pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan).¹⁰

Dengan begitu bahwa mutu pendidikan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bisa menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan memerlukan pemetaan dan kebijakan yang profesional yaitu oleh kepala sekolah. Hal itu diperlukan personal yang mampu dan tangguh. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum sarana dan prasarana) sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Selain itu pada pengamatan dan analisis yang telah di lakukan menurut Hasbullah di ketahui bahwa rendanya mutu pendidikan di sekolah ada beberapa faktor, yaitu:

¹⁰ E. Mulyasa *Kurikulum berbasis kompetensi , konsep, karakteristik implementasi* (Bandung Rosdakarya, 2004) h. 226

“Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientasi pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran yang terlihat pada sekolah tersebut yaitu penekanan pembelajaran tahfiz sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang, pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem, Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 20 tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD kedisnas, namun kenyataannya hanya beberapa yang menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negeri, dan tidak sepenuhnya gratis yang masih ada beberapa pungutan beberapa biaya dari sekolah yang penagaturnya biasanya dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah.”

Dari fenomena-fenomena yang sudah dijelaskan di atas bahwa permasalahan tersebut membutuhkan perhatian yang serius di dunia persekolahan. Sehingga kepala sekolah harus membuat kebijakan untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Karena tujuan utama pendidikan adalah terwujudnya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana peserta didik menjadi harapan lulusan terbaik jika guru nya kurang kesadaran dan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Disini kepala sekolah sebagai pemimpin membuat kebijakan yang tepat. Kepala Sekolah sebagai tulang punggung mutu pendidikan dituntut untuk bertindak sebagai pembangkit semangat, mendorong, merintis dan memantapkan serta sekaligus sebagai administrator. Dengan perkataan lain bahwa kepala sekolah adalah pengambil kebijakan, penentu arah tujuan sekolah, dan menjadi salah satu penggerak pelaksanaan manajemen pendidikan yang berkualitas.

Jadi berkualitas atau tidaknya suatu mutu di sekolah akan tampak pada peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pengawasan yang benar dan objektif menjadi kunci berkualitasnya program dan kegiatan sekolah.

Dari beberapa pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kebijakan kepala sekolah di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia?
2. Bagaimana mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia?
3. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia?
4. Apa faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses kebijakan kepala sekolah di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia.
2. Untuk mengetahui mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia.

3. Untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia.
4. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs. S Ar Ridho Tanjung Mulia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis.
 - a. Secara Teoritis Bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
 - b. Memperluas pemahaman tentang permasalahan mutu pendidikan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Bagi lembaga yang diteliti, sebagai contoh dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan membuat suatu kebijakan.
- b. Bagi kepala madrasah, sebagai bahan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan kualitas mutu lembaga yang dipimpinnya.
- c. Bagi guru, sebagai pertimbangan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah Tersebut.
- d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam merumusan, pelaksanaan dan evaluasi.